JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

# PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DI KECAMATAN PARINGIN KOTA KABUPATEN BALANGAN

**Ikhsan Setiadi[1], Arif Budiman[2], Mahdalina[3]**
Program Studi Adminstrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: ikhsan_setiadi@gmail.com

**ABSTRAK**

Peran Dinas Perhubungan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas sangat penting, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat, kurangnya fasilitas rambu lalu lintas pada beberapa titik rawan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas masih belum optimal. Beberapa indikator telah berjalan baik, seperti penyusunan kebijakan, pelaksanaan sosialisasi, edukasi keselamatan lalu lintas, dan pemeliharaan fasilitas yang tersedia. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang kurang baik, yaitu pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas, penegakan aturan dan pemberian sanksi, kepatuhan pengguna jalan, ketersediaan rambu lalu lintas, kondisi marka jalan, serta penyediaan lampu lalu lintas di beberapa lokasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya frekuensi edukasi, masih banyaknya pelanggaran lalu lintas, dan kurang terlihatnya beberapa rambu lalu lintas. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta upaya penyampaian informasi mengenai aturan dan keselamatan berlalu lintas.

**Kata Kunci:** Peran, Pengaturan Lalu Lintas, Kabupaten Balangan

***ABSTRACT***

*The Transportation Agency's role in reducing traffic violations is crucial, but its implementation still faces several obstacles, such as low public awareness and discipline, a lack of traffic signs at several vulnerable points, and suboptimal inter-agency coordination. This study used a qualitative descriptive method, collecting data through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the Transportation Agency's role in reducing traffic violations is still suboptimal. Several indicators have been successful, such as policy development, outreach, traffic safety education, and maintenance of available facilities. However, several indicators remain deficient, including public understanding of traffic regulations, enforcement and sanctions, road user compliance, availability of traffic signs, condition of road markings, and the provision of traffic lights in several locations. Inhibiting factors in implementation include low public awareness, insufficient education frequency, the continued high number of traffic violations, and the invisibility of some traffic signs. Supporting factors include policies that meet public needs and efforts to disseminate information about traffic regulations and safety.*

***Keywords****: Role, Traffic Regulation, Balangan Regency*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

## PENDAHULUAN

Transportasi menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang proses pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Sistem transportasi yang efektif dan terkelola dengan baik mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian, mempercepat proses distribusi barang dan jasa, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Dalam pembangunan wilayah, transportasi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan sektor transportasi, khususnya lalu lintas jalan raya, perlu dilakukan secara maksimal agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.

Perkembangan jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat menyebabkan permintaan terhadap fasilitas transportasi terus mengalami peningkatan. Salah satu dampak dari perkembangan tersebut dapat dilihat melalui pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Namun, peningkatan jumlah kendaraan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan maupun kesadaran masyarakat dalam menaati aturan berlalu lintas. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan lalu lintas, termasuk meningkatnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk tindakan pengguna jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Jenis pelanggaran yang terjadi cukup beragam, mulai dari pelanggaran yang bersifat administratif hingga tindakan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Beberapa contoh pelanggaran yang sering ditemukan antara lain tidak membawa dokumen kendaraan, tidak menggunakan helm sesuai standar, tidak memakai sabuk keselamatan, menerobos lampu lalu lintas, menggunakan telepon seluler ketika berkendara, serta mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang melampaui batas ketentuan. Walaupun sebagian masyarakat masih menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran ringan, kenyataannya perilaku tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan berkendara masih perlu ditingkatkan. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri masyarakat maupun faktor lingkungan. Faktor internal dapat berupa kurangnya pemahaman terhadap aturan lalu lintas, rendahnya kesadaran mengenai pentingnya keselamatan berkendara, serta sikap kurang peduli terhadap ketentuan yang berlaku. Sementara itu, faktor eksternal dapat berasal dari keterbatasan pengawasan, kurang optimalnya penegakan hukum, kondisi fasilitas lalu lintas yang belum memadai, serta lingkungan sosial yang masih memberikan toleransi terhadap perilaku melanggar aturan.

Kabupaten Balangan sebagai salah satu wilayah yang mengalami perkembangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadapi tantangan dalam bidang ketertiban lalu lintas. Peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat menyebabkan mobilitas penduduk semakin tinggi, yang secara langsung berdampak pada bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor. Situasi tersebut turut meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Beberapa bentuk pelanggaran yang masih sering ditemukan di wilayah Kabupaten Balangan antara lain pengendara yang tidak menggunakan helm, mengabaikan rambu lalu lintas, melakukan parkir tidak pada tempatnya, serta kurang tertib dalam berkendara di jalan umum.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas tidak hanya berpengaruh terhadap kelancaran perjalanan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi faktor penyebab meningkatnya risiko kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas merupakan persoalan yang serius karena dapat menimbulkan kerugian berupa kerusakan material, korban luka, bahkan kehilangan nyawa. Selain memberikan dampak terhadap korban secara langsung, kecelakaan lalu lintas juga dapat memberikan pengaruh psikologis terhadap keluarga korban serta menimbulkan beban sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

melalui pengurangan pelanggaran lalu lintas menjadi langkah penting dalam menciptakan keselamatan pengguna jalan.

Upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sebagai pengguna jalan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan transportasi. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam bidang tersebut adalah Dinas Perhubungan. Instansi ini memiliki kewenangan dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan kebijakan di sektor perhubungan, termasuk pengaturan lalu lintas dan pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan jalan.

Peran Dinas Perhubungan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dapat dilihat melalui beberapa aspek, salah satunya adalah aspek penyediaan fasilitas transportasi. Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam menyediakan serta melakukan pemeliharaan terhadap berbagai sarana lalu lintas, seperti rambu jalan, marka jalan, lampu pengatur lalu lintas, serta fasilitas pendukung lainnya. Ketersediaan fasilitas tersebut sangat diperlukan agar pengguna jalan memperoleh informasi dan petunjuk yang jelas ketika berkendara.

Selain aspek teknis, Dinas Perhubungan juga memiliki peran dalam melakukan pengaturan serta pengawasan lalu lintas. Pengaturan dilakukan terutama pada kawasan yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi maupun lokasi yang rawan terjadi pelanggaran. Melalui pengelolaan arus lalu lintas yang baik, potensi terjadinya kemacetan dan pelanggaran dapat diminimalkan. Di sisi lain, kegiatan pengawasan diperlukan untuk memastikan masyarakat menjalankan aturan lalu lintas sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah fungsi edukasi kepada masyarakat. Dinas Perhubungan dapat meningkatkan kesadaran pengguna jalan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan keselamatan berkendara, kampanye tertib lalu lintas, serta pemanfaatan media informasi. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu membangun budaya disiplin berlalu lintas sehingga masyarakat tidak hanya mematuhi aturan karena adanya pengawasan, tetapi juga karena memahami pentingnya keselamatan di jalan raya.

## METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan yang berlamat di Jl. A. Yani KM 5,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, kode pos 71612.

Pendekatan penelitian merupakan suatu strategi atau perencanaan yang dirancang untuk menentukan bagaimana proses penelitian akan dilaksanakan. Rancangan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif (penjelasan), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hubungan antar variabel serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tipe studi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini ialah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan cara untuk menginterpretasikan data yang ada, seperti halnya mengenai keadaan yang dialami.

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2017:25) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau keperpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Sumber Data menurut Sugiyono (2017:25) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila riset menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya, maka sumber data dikenal sebagai informan, yaitu individu yang memberikan respons dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi sehingga sumber data juga disebut informan. Informan merujuk pada individu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi data. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai infoeman kunci.

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2016:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifak spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

| Variabel | Sub Variabel | Indikator |
|---|---|---|
| Teori Rosmaladewi (2018:75-81) peran | 1. Peran sebagai Regulator | a. Penyusunan dan penerapan kebijakan<br>b. Sosialisasi peraturan lalu lintas kepada masyarakat<br>c. Penegakan aturan terhadap pelanggaran lalu lintas<br>d. Pemberian sanksi kepada pelanggar<br>e. Kejelasan aturan dan rambu lalu lintas di lapangan |
| | 2. Peran Sebagai Dinamisator | a. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas<br>b. Intensitas penyuluhan kepada masyarakat<br>c. Upaya meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas<br>d. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung tertib lalu lintas<br>e. Perubahan perilaku masyarakat setelah sosialisasi |
| | 3. Peran Sebagai Fasilitator | a. Ketersediaan rambu lalu lintas<br>b. Kelengkapan marka jalan<br>c. Penyediaan lampu lalu lintas (traffic light)<br>d. Kondisi dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas<br>e. Penempatan fasilitas di titik rawan pelanggaran/kemacetan |

*Sumber : Diolah Peneliti, 2026*

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:217) sebagai berikut :

1. Wawancara
   Yaitu teknik penggalian data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.
2. Observasi (Pengamatan)
   Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui tekniki analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodelogis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan.

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun presentasi, pada fase ini metode yang paling sederhana untuk maju adalah dengan membagi inovasi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen tertentu, menggunakan ini sebagai garis matriks. Sisi vertikal matriks mencakup periode waktu, mulai dari penggunaan awal hingga penggunaan selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada elemen selama periode tersebut, kita dapat menambahkan penjelasan singkat mengenai perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14).
2. Memasukkan informasi. Pada fase ini, peneliti sedang mencari perubahan yang terjadi pada inovasi, elemen demi elemen. Perubahan tersebut dapat dicatat dalam catatan lapangan wawancara dengan pengguna inovasi yang telah diberi kode, yang secara khusus ditanya apakah mereka telah menciptakan sesuatu yang sudah diberi kode dalam buku inovasi.
3. Menganalisis informasi. Pada fase ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dengan merujuk kembali kepada elemen lain dari catatan lapangan, terutama informasi tambahan yang diberikan oleh orang-orang mengenai perubahan tersebut atau alasannya. Proses analisis informasi dalam penelitian kualitatif berlangsung sejak sebelum ke lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah meninggalkan lapangan.

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (dalam Patimah 2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatkan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck.*

1. Perpanjangan pengamatan
   Perpanjangan pengamatan menunjukkan bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian, melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang lama serta yang baru. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kedekatan antara peneliti dan narasumber agar semua informasi dapat diungkap tanpa ada yang ditutupi.
2. Meningkatkan ketekunan
   Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Dengan cara ini, data dan rangkaian kejadian dapat dicatat dengan tepat dan teratur. Dengan cara meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan rujukan dalam konteks ini adalah keberadaan saksi yang dapat membuktikan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Informasi mengenai hubungan antar manusia atau deskripsi suatu situasi perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Peralatan untuk merekam informasi dalam penelitian kualitatif, seperti kamera dan alat perekam suara, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

4. *Member check*

Member check merupakan langkah untuk memverifikasi informasi yang didapat oleh peneliti dari sumber data. Tujuan dari member check adalah untuk menilai seberapa akurat data yang diperoleh dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh sumber data.

## PEMBAHASAN

1. Peran sebagai Regulator

Dalam menjalankan perannya sebagai regulator, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan, pengendalian, serta pengawasan terhadap sistem lalu lintas di wilayah Kabupaten Balangan. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan berbagai kebijakan, pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan lalu lintas, serta memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan oleh masyarakat. Melalui fungsi regulator ini, Dinas Perhubungan berupaya menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar guna mendukung kenyamanan serta keselamatan seluruh pengguna jalan.

a. Penyusunan dan penerapan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan serta pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam rangka menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib. Penerapan kebijakan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat sebagai pengguna jalan..

b. Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas kepada masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya sebagian masyarakat, khususnya pada wilayah tertentu, yang belum memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai mengenai pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran masih sering ditemukan, seperti pengendara yang tidak menggunakan helm serta pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

c. Penegakan Aturan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan aturan terhadap pelanggaran lalu lintas masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya masyarakat yang melakukan pelanggaran meskipun berbagai ketentuan lalu lintas telah diterapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya pengawasan pada beberapa lokasi jalan, sehingga sebagian pengguna jalan cenderung mengabaikan rambu lalu lintas maupun ketentuan keselamatan dalam berkendara.

d. Pemberian Sanksi Kepada Pelanggar

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelanggar lalu lintas masih belum berjalan secara optimal. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar di Kabupaten Balangan belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera, sehingga masih terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran secara berulang. Hal tersebut menunjukkan bahwa

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan, mengingat pelanggaran masih ditemukan di berbagai wilayah akibat sanksi yang belum dianggap cukup memberikan dampak pencegahan.

e. Kejelasan Aturan Dan Rambu Lalu Lintas Di Lapangan
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi melalui aturan dan rambu lalu lintas di lapangan masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya beberapa rambu lalu lintas yang kurang terlihat dengan jelas maupun dalam kondisi yang sudah tidak layak digunakan. Keadaan tersebut dapat menghambat pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sehingga berpotensi menyebabkan masih terjadinya pelanggaran lalu lintas di beberapa wilayah.

2. Peran sebagai Dinamisator
Dalam perannya sebagai dinamisator, Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib dan aman. Peran tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan, pemberian edukasi, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan dan menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Dengan adanya peran dinamisator ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna jalan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mendukung terciptanya budaya tertib lalu lintas..

a. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai keselamatan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari upaya aktif Dinas Perhubungan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan, tata tertib, serta pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai kewajiban menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara serta pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi terciptanya ketertiban dan keamanan di jalan raya.

b. Intensitas penyuluhan kepada masyarakat
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa intensitas pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan secara berkala dengan sasaran masyarakat umum maupun kalangan pelajar sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai aturan berlalu lintas. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin dalam mematuhi peraturan serta menerapkan perilaku berkendara yang aman di jalan raya.

c. Upaya meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap beberapa aspek keselamatan berkendara, seperti penggunaan helm, kelengkapan administrasi maupun perlengkapan kendaraan, serta kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan..

d. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung tertib lalu lintas
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban lalu lintas masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pengguna jalan yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan keselamatan berkendara. Salah satu bentuk pelanggaran yang masih sering dijumpai adalah pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, baik

pada pihak pengemudi maupun penumpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku tertib dan aman berlalu lintas masih perlu ditingkatkan..

e. Perubahan perilaku masyarakat setelah sosialisasi
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku masyarakat setelah pelaksanaan sosialisasi masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pengguna jalan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dalam kegiatan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas..

3. Peran Sebagai Fasilitator
Dalam perannya sebagai fasilitator, Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam menyediakan, mengelola, serta melakukan pemeliharaan terhadap berbagai sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih efektif serta menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan di Kabupaten Balangan..

a. Ketersediaan rambu lalu lintas
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas rambu lalu lintas masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa lokasi, seperti persimpangan jalan dan kawasan pasar, yang belum dilengkapi dengan rambu peringatan maupun rambu petunjuk arah yang memadai. Keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan pengguna jalan mengalami kesulitan dalam memahami aturan dan kondisi lalu lintas di wilayah tersebut. Akibatnya, ketertiban arus kendaraan menjadi kurang maksimal, terutama pada waktu-waktu dengan tingkat mobilitas tinggi seperti pagi dan sore hari..

b. Kelengkapan marka jalan
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan kondisi marka jalan masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya beberapa ruas jalan dengan marka yang mengalami kepudaran sehingga kurang terlihat jelas oleh pengguna jalan. Kondisi ini dapat mengurangi fungsi marka sebagai petunjuk dan pengarah bagi pengendara, terutama pada malam hari maupun ketika kondisi cuaca kurang mendukung seperti saat terjadi hujan..

c. Penyediaan lampu lalu lintas (traffic light)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyediaan fasilitas lampu pengatur lalu lintas (traffic light) masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa persimpangan yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan cukup tinggi namun belum dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan arus kendaraan menjadi kurang tertib dan berpotensi menimbulkan hambatan maupun gangguan terhadap kelancaran lalu lintas..

d. Kondisi dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi serta pemeliharaan fasilitas lalu lintas telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari fasilitas lalu lintas yang tersedia masih berada dalam kondisi yang terawat dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Keadaan ini menunjukkan adanya upaya pemeliharaan yang dilakukan sehingga fasilitas tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendukung kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

e. Penempatan fasilitas di titik rawan pelanggaran/kemacetan
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penempatan fasilitas lalu lintas pada lokasi yang memiliki potensi pelanggaran maupun kemacetan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa titik strategis yang belum dilengkapi dengan rambu-rambu maupun fasilitas pengaturan lalu lintas yang memadai.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Kondisi tersebut menyebabkan pengguna jalan belum memperoleh arahan yang jelas dalam berkendara, sehingga dapat memengaruhi tingkat ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas..

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan.

1. Faktor Penghambat

   Dalam pelaksanaan suatu penelitian, tentunya terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan penelitian. Begitu pula dalam mengkaji peran Dinas Perhubungan dalam pengaturan lalu lintas di Kabupaten Balangan, terdapat beberapa faktor pendukung yang membantu terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, serta faktor penghambat yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pengaturan lalu lintas di wilayah tersebut.

   a. Kurangnya Frekuensi Program Edukasi

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya intensitas pelaksanaan edukasi mengenai lalu lintas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan serta pentingnya keselamatan berkendara. Penyampaian informasi yang hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan tidak secara berkelanjutan menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap materi yang diberikan belum terbentuk secara maksimal. Akibatnya, informasi mengenai tertib berlalu lintas yang telah disampaikan cenderung mudah terlupakan oleh masyarakat.

   b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Mematuhi Peraturan Lalu Lintas

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas menjadi salah satu penyebab masih terjadinya pelanggaran di jalan raya. Beberapa bentuk pelanggaran yang masih sering ditemukan antara lain tidak menggunakan helm saat berkendara, menerobos lampu lalu lintas, serta menggunakan telepon seluler ketika mengemudikan kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan keselamatan berlalu lintas masih perlu ditingkatkan melalui upaya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

   c. Banyak Pengendara yang tidak Mematuhi Aturan Lalu Lintas

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih terjadinya pelanggaran lalu lintas secara berulang menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara masih perlu ditingkatkan. Sebagian pengguna jalan masih cenderung mengabaikan aturan lalu lintas karena mengutamakan kemudahan, kepraktisan, maupun keinginan untuk mencapai tujuan dalam waktu yang lebih cepat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas masih belum sepenuhnya tertanam dalam perilaku masyarakat.

   d. Beberapa Rambu Yang Sulit Dilihat

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi sebagian rambu lalu lintas masih menjadi salah satu kendala dalam mendukung ketertiban berlalu lintas. Beberapa rambu mengalami kerusakan maupun terhalang oleh pepohonan sehingga kurang terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan pengendara mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai aturan, larangan, maupun petunjuk yang berlaku pada suatu ruas jalan, sehingga berpotensi meningkatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas..

2. Faktor Pendukung

   Dalam suatu penelitian, selain terdapat berbagai faktor yang menjadi kendala, terdapat pula faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Berkaitan dengan penelitian mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengaturan Lalu Lintas di Kabupaten Balangan, terdapat beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

a. Kebijakan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat
   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan penerapan aturan lalu lintas perlu disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik masyarakat di suatu wilayah. Pada kawasan yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi, diperlukan pengaturan lalu lintas yang lebih spesifik dan tepat sasaran agar permasalahan seperti kemacetan dapat diminimalkan. Dengan adanya kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan, pengguna jalan diharapkan dapat merasakan kenyamanan, keamanan, serta kelancaran dalam melakukan aktivitas berkendara..
b. Penyampaian Informasi Secara Rutin
   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan telah berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait peraturan lalu lintas kepada masyarakat. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, pemasangan spanduk, serta kegiatan sosialisasi secara langsung di lingkungan masyarakat. Upaya tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan serta menjaga keselamatan dalam berlalu lintas.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam Pengaturan Lalu Lintas di Kabupaten Balangan secara umum masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek peran, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Pada peran sebagai regulator, penyusunan dan penerapan kebijakan telah berjalan dengan baik melalui pengaturan lalu lintas yang dilakukan secara terencana oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Namun, beberapa indikator masih belum optimal, seperti sosialisasi peraturan lalu lintas kepada masyarakat, penegakan aturan terhadap pelanggaran, pemberian sanksi kepada pelanggar, serta kejelasan aturan dan rambu lalu lintas di lapangan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang belum memahami aturan lalu lintas, masih terjadinya pelanggaran meskipun aturan telah diterapkan, sanksi yang belum memberikan efek jera secara maksimal, serta masih ditemukannya rambu lalu lintas yang kurang terlihat maupun tidak layak digunakan. Pada peran sebagai dinamisator, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas serta intensitas penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar telah berjalan dengan baik karena Dinas Perhubungan aktif memberikan informasi mengenai aturan dan tata tertib berlalu lintas. Namun, upaya meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam mendukung tertib lalu lintas, serta perubahan perilaku masyarakat setelah sosialisasi masih belum optimal karena masih banyak pengguna jalan yang belum mematuhi aturan keselamatan berkendara, seperti penggunaan helm, kelengkapan kendaraan, dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas. Selanjutnya, pada peran sebagai fasilitator, masih terdapat beberapa kendala dalam penyediaan fasilitas lalu lintas, seperti kurangnya ketersediaan rambu lalu lintas pada beberapa persimpangan jalan dan kawasan pasar, kondisi marka jalan yang telah pudar, keterbatasan penyediaan lampu lalu lintas (traffic light) pada lokasi padat kendaraan, serta belum optimalnya penempatan fasilitas pada titik rawan pelanggaran dan kemacetan. Meskipun demikian, kondisi dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas yang tersedia telah berjalan dengan baik karena fasilitas tersebut masih terawat dan dapat digunakan oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam Pengaturan Lalu Lintas di Kabupaten Balangan terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

meliputi rendahnya frekuensi kegiatan edukasi lalu lintas, kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan berkendara, masih tingginya pelanggaran lalu lintas, serta kondisi beberapa rambu yang sulit terlihat. Sementara itu, faktor pendukung meliputi adanya kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta penyampaian informasi mengenai aturan lalu lintas secara rutin melalui berbagai media dan kegiatan sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalulintas Di Jalan.

Miles, Huberman dan Saldana, 2017. Qualitative Data Analysis A Methode Sourcebook. Publications.

Sugiyono. 2017, Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta Bandung.

Tim Penyusun, 2025. Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai.